

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

Oleh:

Samsul Arifin¹, Heriyani Agustina², Nursahidin³
Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon^{1,2,3}
Email: heriyani.agustina@gmail.com²

ABSTRACT

This research is a qualitative research using verbal data from respondents' information about the implementation of the teacher certification policy in a position at the Cirebon District Education Office. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. The selection of informants used purposive sampling technique. Data analysis in this study uses qualitative descriptive analysis with data reduction and data display stages.

The implementation study is a study of policy studies that lead to the implementation process of a policy. In practice policy implementation is a process that is so complex that it is not infrequently politically charged with the intervention of various interests. This study uses the theory of George C. Edward III. In this theory, the success of a policy implementation is influenced by four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Furthermore, to analyze the implementation of the Teacher Certification Policy in the Office of the Cirebon District Education Office, this research will focus on observing these factors as observable phenomena.

Based on the results of the study showed that the implementation of the teacher certification policy in the position in the Cirebon District Education Office, in general, has gone well. In the communication factor, the subfactor of transmission and consistency of information is good, but from the subfactor of clarity, there is a problem. This lack of clarity in information includes the requirements to carry out certification. Furthermore, on the factors of resources, sub-factors of staff, information, authority is effective but the sub-factors of facilities are inadequate. Facilities in the form of facilities and infrastructure, as well as a special budget for the implementation of certification in the Cirebon District Education Office, are insufficient. The factors of the disposition of the implementor include good. The bureaucratic structure factor also supports the implementation of the policy.

The Cirebon District Education Office needs to conduct an optimal socialization by empowering principals and teacher supervisors, optimizing the utilization of a database of all public and private teachers in Cirebon District. Furthermore, the Cirebon District local government prioritized funds for implementing teacher certification in positions in the Cirebon District Education Office and providing incentives for implementers as beneficiaries.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan struktur ketenagakerjaan di era globalisasi sekarang ini, menuntut Indonesia untuk dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkompetisi ditingkat dunia, karena hanya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) kompetitif yang dapat menghasilkan nilai tambah dengan demikian menghasilkan kesejahteraan lebih baik. Jika tidak, masyarakat bakal terperangkap pada fenomena bekerja tetapi tetap miskin.

Pendidikan merupakan sarana mutlak yang dipergunakan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Tetapi disisi lain, masalah pendidikanpun dihadapkan pada masalah yang serius, kita tidak dapat menutup mata bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat diakibatkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Proses yang tidak maksimal mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik, proses pendidikan disekolah terletak pada tangan guru, bagaimana

melaksanakan pembelajaran, memberi motivasi belajar, dan mengelola pembelajaran jika kualitas guru masih rendah, oleh karena itu guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumberdaya lain yang tersedia kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Guna

meningkatkan kualitas guru, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru dalam jabatan.

Sertifikasi merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, sertifikasi guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Panitia Sertifikasi Guru (PSG) harus mengimplementasikan dengan tujuan dan target yang jelas, sumber daya yang mendukung serta strategi komunikasi yang tepat agar program sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi tetapi sebagai upaya meningkatkan

motivasi dan kinerja guru secara terencana terarah dan berkesinambungan. Hal tersebut sebagaimana yang diharapkan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupeten Cirebon dimana kebijakan sertifikasi guru ini dilaksanakan lebih optimal agar tujuan sertifikasi guru tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ditemukan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan kurang optimal, hal tersebut terlihat dari hal-hal berikut:

1. Kurang tercapainya tujuan sertifikasi yaitu peningkatan mutu guru. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya perbedaan kualitas guru yang sudah sertifikasi dengan guru belum sertifikasi.
2. Peserta sertifikasi guru kurang memahami kebijakan sertifikasi dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi guru. Hal tersebut dilihat dari banyaknya peserta sertifikasi mengalami kesalahan ataupun ketidak siapan dalam melaksanakan sertifikasi.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON”

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian diatas, dirumuskan problem statemen (pernyataan masalah) sebagai berikut:

Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon kurang optimal. Untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

Berpedoman pada rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon?

3. Hambatan-hambatan apa yang dialami dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon serta strategi dalam mengatasi masalah tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon serta strategi dalam mengatasi masalah tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoritis:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan penulis mengenai implementasi kebijakan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di tahun berikutnya.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

B. Secara Praktis:

1. Untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang ada pada Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Kebijakan Sertifikasi Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis

dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan *Eugene Bardach* dalam Leo Agustino (2006: 138), yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh *Chief J.O Udoji* dalam Leo Agustino (2006: 140) dengan mengatakan bahwa:

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle dalam Leo Agustino (2006: 139) sebagai berikut:

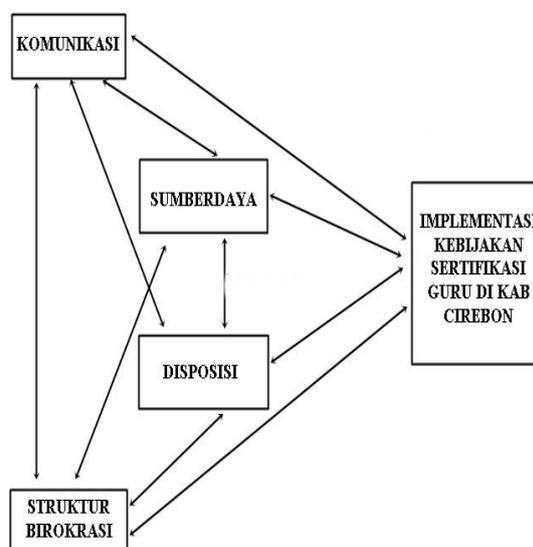
Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Teori yang digunakan untuk dapat menganalisis implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III. Dalam teori tersebut keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, untuk menganalisa implementasi Kebijakan

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, penelitian ini akan difokuskan untuk mengamati faktor-faktor tersebut sebagai fenomena pengamatan. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Fenomena pertama yang diamati dalam implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Dinas

Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah komunikasi. Komunikasi harus akurat sehingga dapat dimengerti dengan cermat oleh para peserta sertifikasi guru. Pengamatan fenomena dalam komunikasi ini akan difokuskan pada transmisi, konsistensi dan kejelasan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Implementasi kebijakan sertifikasi dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara legal didasarkan atas UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola yaitu: Uji kompetensi dalam bentuk Penilaian Portofolio (PF), Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL), dan Pola Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai pelaksana sertifikasi di

tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan meneruskan informasi dalam bentuk penetapan kuota dan sosialisasi sertifikasi kepada guru. Materi sosialisasi antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan teknis pelaksanaan PLPG, dan (6) jadwal penyerahan dokumen atau persyaratan sertifikasi.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa pemberian tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kebijakan

tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kebijakan sertifikasi guru terutama bagi guru yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara umum berjalan baik.

Dalam pandangan beberapa ahli maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran.

Kedua, sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekeurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor,

dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen.

Ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kondisi masing-masing faktor tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat di jelaskan sebagai berikut:

2.3 Hambatan-hambatan apa yang dialami dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon serta strategi dalam mengatasi masalah tersebut.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon selalu saja mengalami hambatan dalam pelaksanaannya entah itu dalam komunikasi, sumber daya manusianya maupun dalam sumber daya materilnya dibawah ini beberapa hambatan dan bagaimana strategi dalam mengatasi hambatannya.

- Yang jadi kendala dari luas dan daerah kabupaten Cirebon tersebar. Bagian utara merupakan dataran rendah, sedang bagian barat daya berupa pegunungan, yakni lereng Gunung Ciremai. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara, sehingga mengalami

kesulitan dalam melakukan sosialisasi yang merata.

- Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Permasalahan ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, masih ada guru yang kebingungan tentang kepastian persyaratan masa kerja. Informasi tentang persyaratan masa kerja tiap tahun berubah-ubah.
- Komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon termasuk belum cukup memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan belum mencukupi, seperti tidak adanya insentif untuk para pelaksana kebijakan. Padahal Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.
- Syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar

perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Persoalan lain yang dihadapi antara lain adalah kondisi fisik para guru, keluarga, keuangan, dan terganggunya proses pendidikan di sekolah tempat guru yang bersangkutan mengajar.

- Yang menjadi pendorong banyak guru mengikuti sertifikasi yaitu tunjangan profesi bukan karena ilmu yang akan didapatkan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Hal ini menjadikan tujuan sertifikasi guru yaitu peningkatan kualitas mutu guru kurang tercapai.

Hambatan-hambatan di atas cukup jelas bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon masih kurang optimal, dibawah ini merupakan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut:

- Mengingat wilayah Kabupaten Cirebon yang tersebar luas, sosialisasi informasi pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan strategi membagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu wilayah timur, tengah, dan barat.
- Perlu adanya konsistensi sosialisasi sehingga tidak terjadi kesimpang

siuran informasi yang diterima oleh peserta sertifikasi.

- Adanya suatu komitmen bersama dari panitia sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mensukseskan program sertifikasi ini demi meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon khususnya, dan dunia Pendidikan Indonesia pada umumnya. Mengingat dalam proses sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai hambatan maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Cirebon dan jajarannya sesegera mungkin merespon dan mengantisipasi dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada semua guru yang akan menghadapi uji sertifikasi guru.
- Bisa diantisipasi dengan menyusun persyaratan sertifikasi lebih awal meski belum ditunjuk sebagai peserta sertifikasi.
- Mengoptimalkan sosialisasi tentang tujuan sertifikasi guru, dan menyamakan komitmen untuk meningkatkan kualitas mengajar para guru.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa pemberian tunjangan profesi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi

(Ditjen Dikti), Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

- Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara umum berjalan baik. Namun, kebijakan sertifikasi guru yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berjalan lancar dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan beberapa ahli maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi implementor, 4) dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara umum

berjalan baik. Namun, kebijakan sertifikasi guru yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy maker bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berjalan lancar dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan beberapa ahli maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi implementor, 4) dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah komunikasi. Faktor ini meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan telah dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi ini menjadi hal

yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya, para pelaksana sudah mampu menyampaikan informasi dengan baik. Informasi yang diberikan berisi materi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (6) jadwal dan tata cara pola pendidikan latihan profesi guru (PLPG).

Konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru juga baik. Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga kekonsistenan informasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten

Cirebon. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru. Hal ini disebabkan sebagian besar dikarenakan persyaratan masa kerja tiap tahun berubah-ubah.

2. Sumber daya

Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Komponen yang pertama adalah staf. Meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak terlalu banyak namun dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam hal implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Ketersediaan buku pedoman di lingkungan pelaksana memadai namun bagi guru yang ingin

memiliki buku tersebut harus menggandakan sendiri.

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mampu menjalankan wewenang secara efektif.

Komponen keempat dalam sumberdaya adalah fasilitas. Komponen fasilitas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon termasuk belum memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dirasa belum mencukupi, seperti tidak adanya insentif untuk para pelaksana kebijakan. Padahal Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

3. Disposisi Implementor

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Secara umum kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah baik. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Pendidikan Kabupaten Cirebon termasuk baik. *Standart Operating Procedures/ SOP* yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam tentang teknis pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Struktur birokrasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi menjadi fleksibel. Adanya hubungan hierarkhi dan pembagian tanggung

jawab yang tegas di antara personel menyebabkan struktur birokrasi menjadi efektif. Pelaksanaan pekerjaan juga dibarengi dengan pengawasan yang efektif.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, peneliti memberikan beberapa saran dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Komunikasi

Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, para kepala sekolah serta pengawas guru dalam pemberian informasi kepada guru di Kabupaten Cirebon. Sosialisasi yang optimal ini untuk meminimalisir ketidakjelasan para guru.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengoptimalkan pemanfaatan database seluruh guru baik negeri maupun swasta di Kabupaten Cirebon yang akan mengikuti sertifikasi sampai tahun 2015. Hal ini untuk mengurangi persoalan jatah tiap tahun, juga memudahkan guru mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi

guru, termasuk membantu guru dalam membuat perencanaan.

Para pelaksana yang merupakan staf bidang tenaga pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon harus memiliki kemampuan dan menguasai mekanisme penyusunan dan pelaksanaan sertifikasi dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan sertifikasi guru agar pelaksanaannya lebih optimal.

Para guru lebih proaktif menanyakan secara langsung kepada pihak berkompeten mengenai syarat administrasi dan syarat akademik.

2. Sumber daya

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon agar lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Faktor pembiayaan merupakan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut selama ini.

3. Disposisi Implementor

Perlunya pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai reward atas komitmen mereka dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Pemberian reward ini merupakan

faktor pendorong yang membuat para pelaksana meningkatkan kinerja dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam Jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

4. Struktur Birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah karena agar tujuan ideal yang akan diwujudkan dapat tercapai.

Tim supervisi dan verifikasi data yang merupakan staf tenaga pendidik harus terus ditingkatkan kinerjanya sehingga data guru yang masuk bisa memenuhi kuota yang ditetapkan. Penetapan kuota peserta sertifikasi antara guru PNS dan guru non-PNS atau swasta juga harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan pertimbangan jumlah guru yang ada di Kabupaten Cirebon. Penetapan secara proporsional sejak dari awal akan memperlancar proses pengumpulan berkas sehingga tidak ada pengisian kekurangan kuota. Pengisian kekurangan kuota

terkadang dilakukan secara mendadak sehingga banyak guru yang tidak siap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustino, Leo., *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung, 2006

Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Peterjemah Samudra Wibowo,dkk, Gajah Mada University Press, 2003

J. Moleong. Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

Nawawi, Ismail., *Public Policy*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

Nugroho, Rian., *Kebijakan Publik*, PT Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2006

Parsons, Wayne., *Public Policy*. Kencana Media Grope, Jakarta 2006

Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Wahab, Solichin Abdul., *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Winarno, Budi., *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo, Yogyakarta, 2004

Yamin, Martinis., *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009

B. Peratuatran Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

C. Lain-lain

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Guru Dalam Jabatan Tingkat Kabupaten Cirebon.
<http://tongamsinambela.blogspot.com/2012/01/kualitas-sdm-indonesia.html>, diakses pada 11 Maret 2012 Pukul 23.00 WIB.